



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. H. Rky. Rasuna Said, SH Telp. 92779 Payakumbuh 26213 e-mail : bappedakotapyk@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 065/ 064 /Bappeda-Ko/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik, untuk itu diperlukan peta proses bisnis bagi setiap instansi pemerintah;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Prta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, peta proses bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 25);

10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 75 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 75);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh;
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Peta proses bisnis disusun sebagai acuan bagi setiap personil dan unit kerja di Bappeda dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal : 5 Agustus 2020

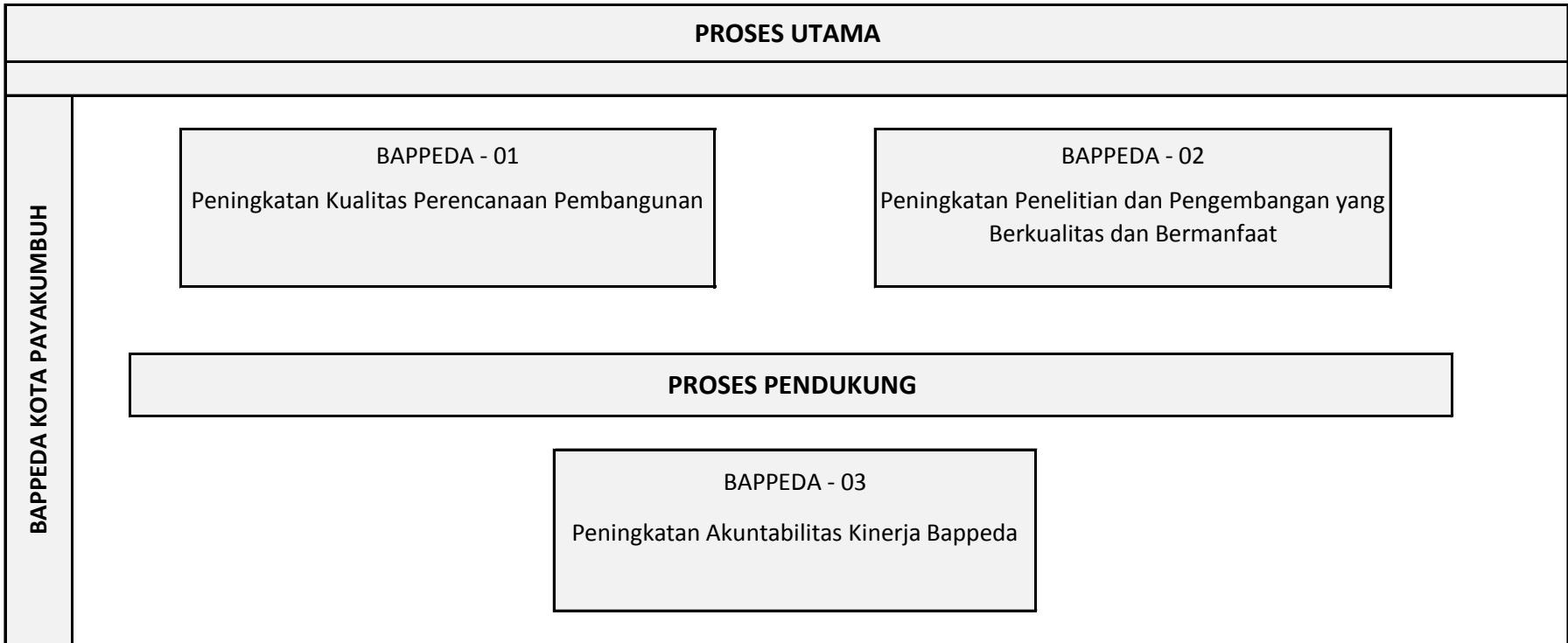
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751005 199501 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bpk. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh
3. Sdr. Yang bersangkutan



PETA SUB PROSES

BAPPEDA - 01

Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

BAPPEDA - 01.1
Peningkatan Perencanaan
Partisipatif

BAPPEDA - 01.2
Peningkatan Kualitas Dokumen
Perencanaan

BAPPEDA - 01.3
Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan

PETA RELASI

BAPPEDA - 01.1
Peningkatan Perencanaan Partisipatif

BIDANG EKONOMI & PERENCANAAN MAKRO

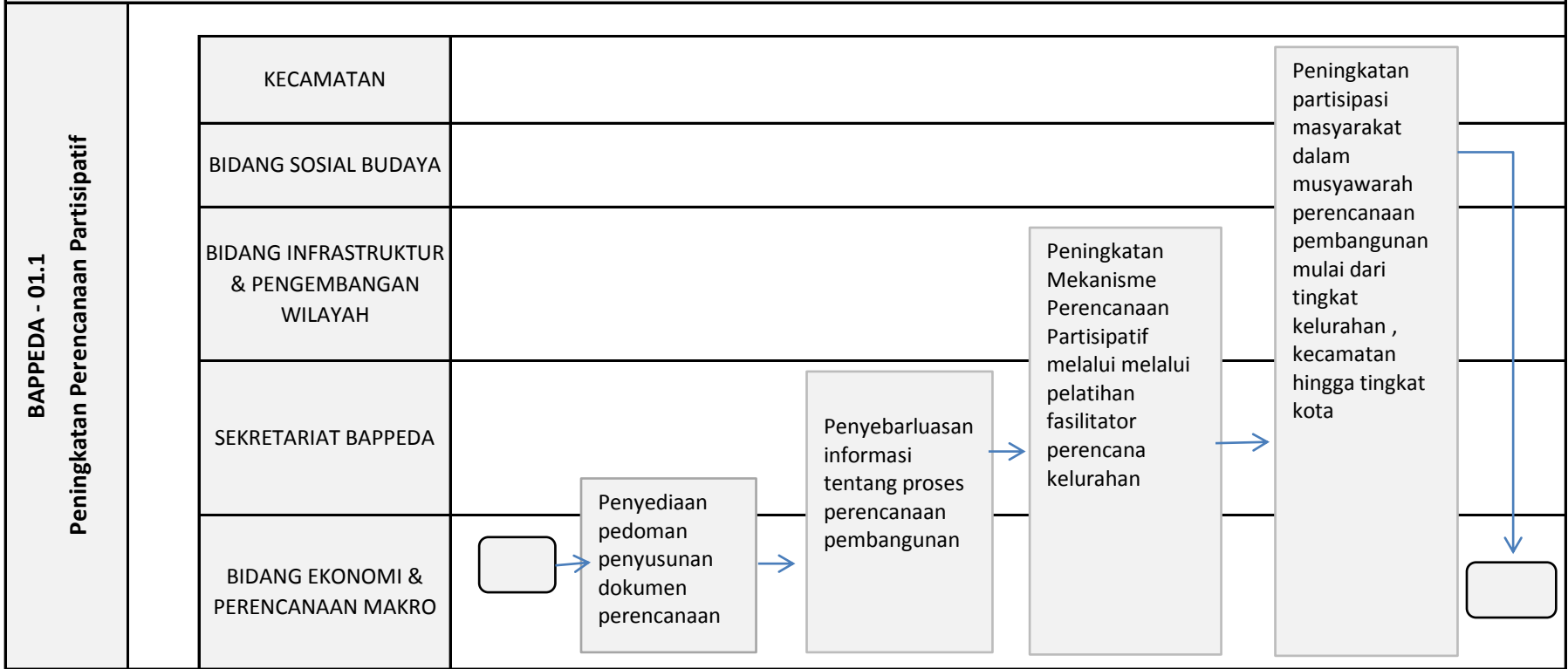
SEKRETARIAT BAPPEDA

BIDANG SOSIAL BUDAYA

KECAMATAN

BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

BAPPEDA - 01.2
Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan

BIDANG EKONOMI & PERENCANAAN MAKRO

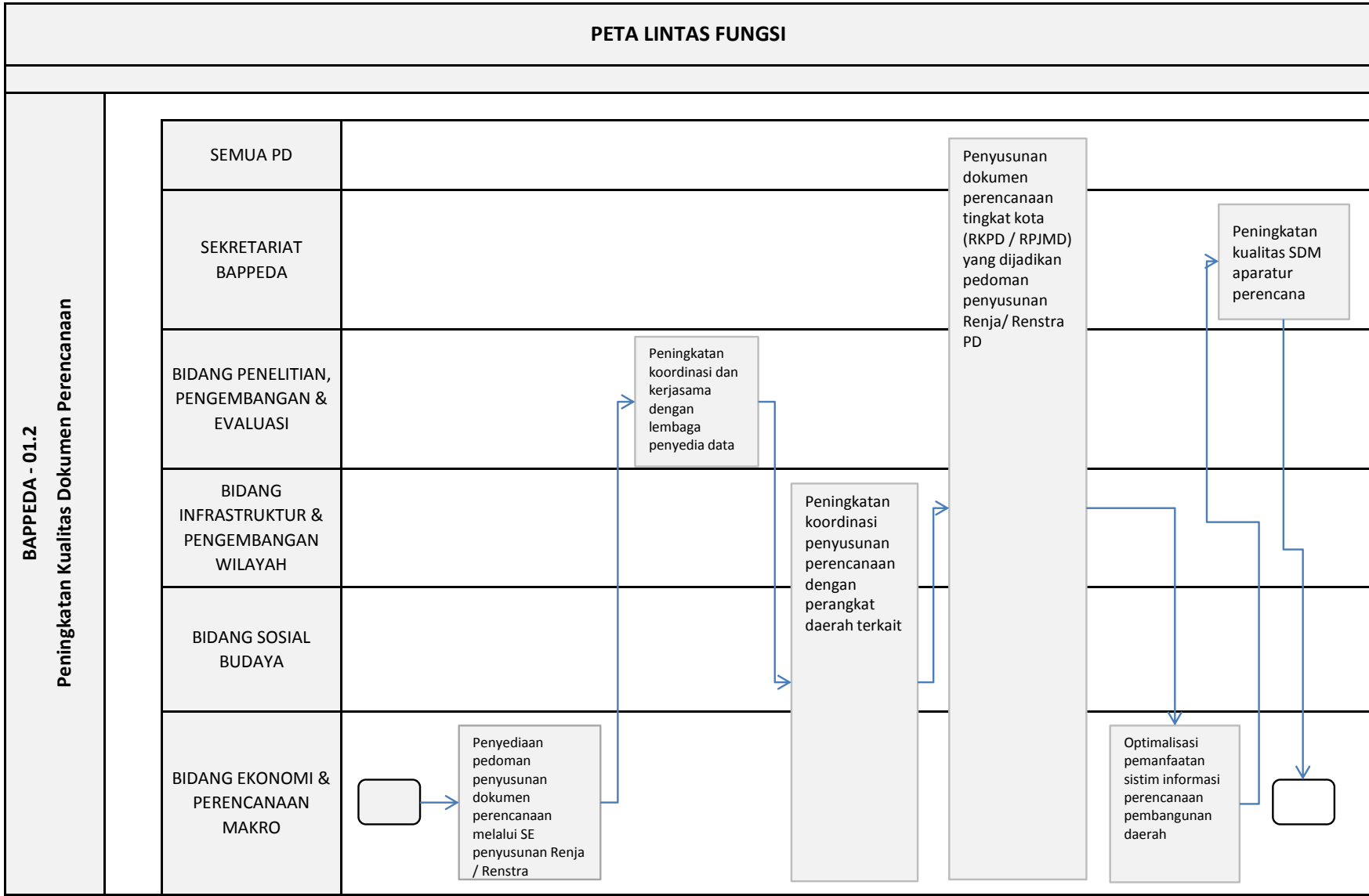
SEMUA PERANGKAT DAERAH (PD)

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN & EVALUASI

BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

BAPPEDA - 01.3
Peningkatan Capaian Kinerja Pembangunan

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN & EVALUASI

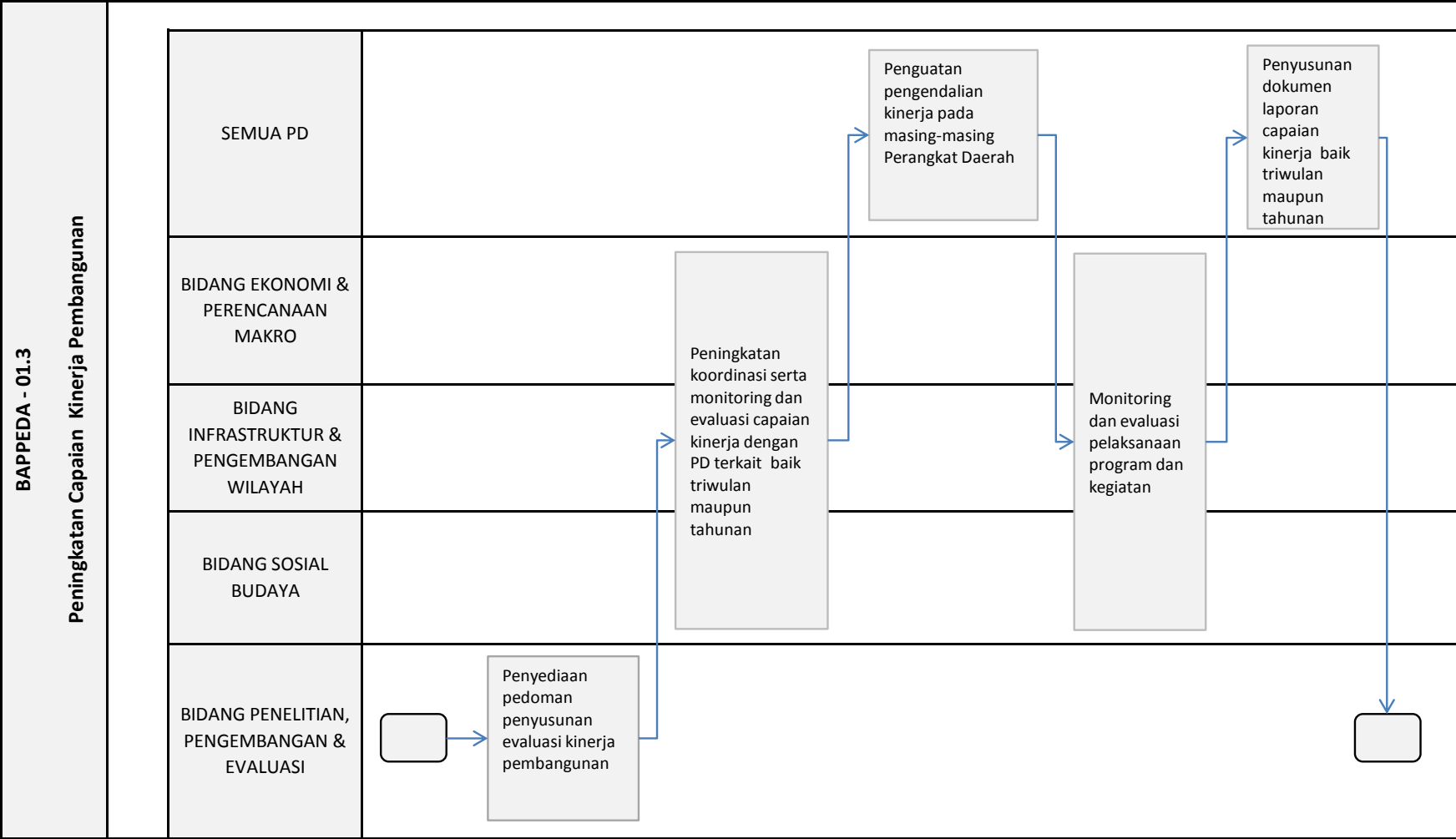
SEMUA PERANGKAT DAERAH (PD)

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG EKONOMI & PERENCANAAN MAKRO

BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

PETA LINTAS FUNGSI



PETA SUB PROSES

BAPPEDA - 02
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

BAPPEDA - 02.1
Peningkatan Kualitas Hasil Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

PETA RELASI

BAPPEDA - 02.1
Peningkatan Kualitas Hasil Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN & EVALUASI

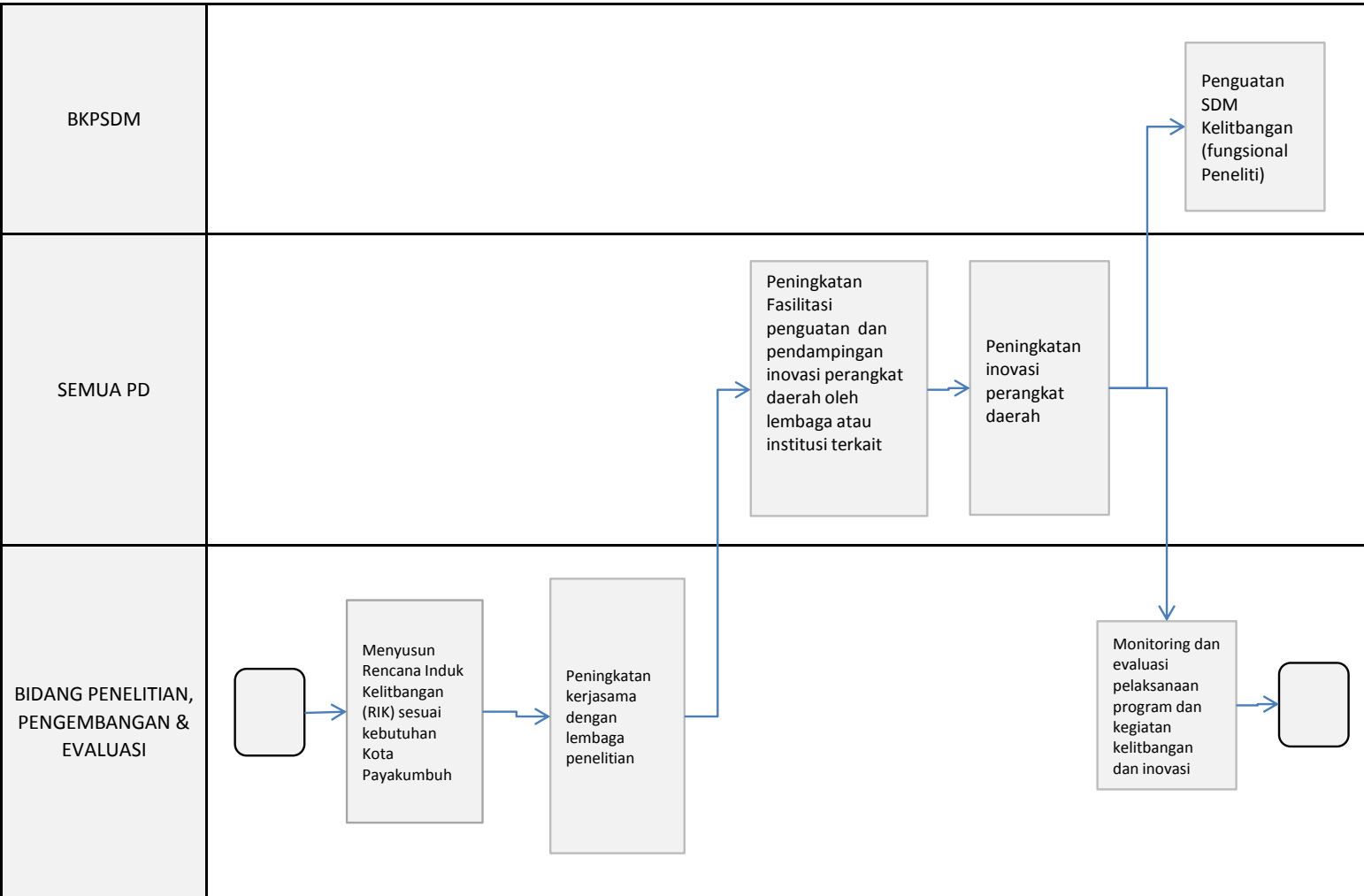
SEMUA PERANGKAT DAERAH (PD)

BKPSDM

PETA LINTAS FUNGSI

BAPPEDA - 02.1

Peningkatan Kualitas Hasil Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan Daerah



PETA SUB PROSES

BAPPEDA - 03

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bappeda

BAPPEDA - 03.1
Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal
Bappeda

BAPPEDA - 03.2
Peningkatan Kualitas Perencanaan Bappeda

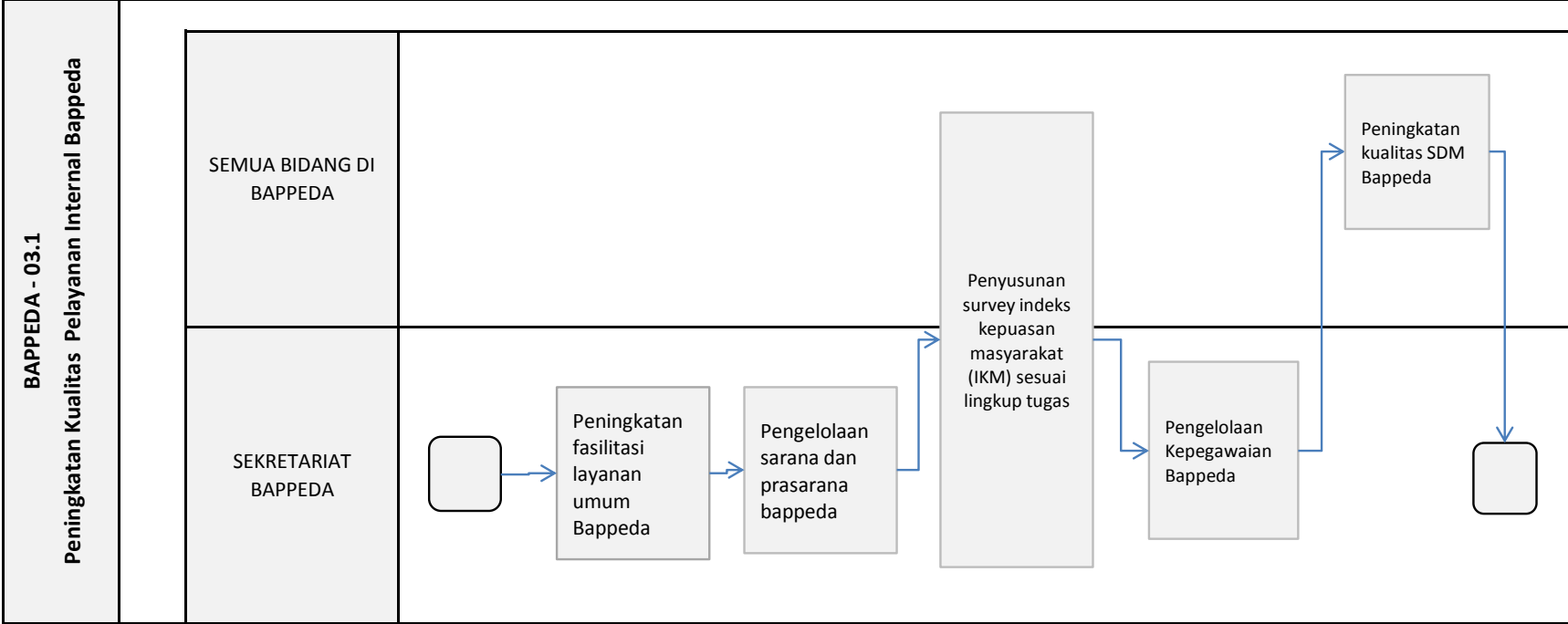
PETA RELASI

BAPPEDA - 03.1
Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal Bappeda

SEKRETARIAT BAPPEDA

SEMUA BIDANG DI BAPPEDA

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

BAPPEDA - 03.2
Peningkatan Kualitas Perencanaan Bappeda

SEKRETARIAT BAPPEDA

SEMUA BIDANG DI BAPPEDA

PETA LINTAS FUNGSI

BAPPEDA - 03.2
Peningkatan Kualitas Perencanaan Bappeda

SEMUA BIDANG DI
BAPPEDA

SEKRETARIAT
BAPPEDA

